

REVISI PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI TAHUN 2021

19

Mandala Harefa

Abstrak

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi oleh beberapa lembaga keuangan internasional pada akhir kuartal pertama 2021. Menurut lembaga-lembaga tersebut, memperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan tumbuh hanya sebesar 4,3% yoy. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 4,8%–5% yoy. Revisi proyeksi tersebut dikarenakan ada faktor-faktor resiko dan respons kebijakan. Tulisan ini menganalisis respons pemerintah setelah adanya revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga dan memanfaatkan momentum setelah dilaksanakannya vaksinasi? Mempertahankan pemulihan (safeguarding the recovery) agar terus didorong dengan memberikan stimulus, seperti bantuan sosial masyarakat dan memberi insenti relaksasi perpajakan dunia usaha. Untuk UMKM dan korporasi, juga diberikan insentif agar meningkatkan belanja sosial bagi masyarakat. DPR RI perlu mendorong sekaligus melakukan pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Hal ini guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan meningkatkan daya beli dan penyesuaian bauran kebijakan, sembari menjaga kontinuitas vaksinasi.

Pendahuluan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia *Spring Meeting* April 2021 menegaskan, memasuki tahun ke-2 pandemi Covid-19 ada rasa optimis perekonomian domestik berjalan baik. Hal ini dikarenakan program vaksinasi telah berjalan, adanya dukungan bauran kebijakan dan prospek ekonomi global yang semakin membaik. Namun optimisme

perekonomian yang semakin membaik dengan keberlanjutan pemulihan ekonomi juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh dalam menjawab ketidakpastian (kemenkeu.go.id, 12 April 2021).

Masih tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dalam negeri dan dunia saat ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 yang dilakukan oleh lembaga-lembaga



ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan Covid-19 dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario. Ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan ekonomi global. Bank Dunia misalnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 5,2-5,6%. Sedangkan Bank Pembangunan Asia sebesar 5,0%, Lembaga Moodys memproyeksikan hanya 4,3% jauh di bawah perkiraan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) yang proyeksinya sangat optimis yaitu 8,2% (kemenkeu.go.id, 2021)

Kajian Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 akan turun dari 4,8% menjadi 4,3%. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan ada beberapa faktor yang sedang terjadi, seperti permasalahan pasokan vaksinasi dan kekhawatiran gelombang kedua dan ketiga pandemi Covid-19 sehingga akan terjadi perubahan yang tidak dapat diprediksi. Prediksi IMF atau lembaga internasional manapun selalu mengacu pada subyek yang bisa berubah (*subject to uncertainty*) (kontan.co.id, 9 April 2021). Tulisan ini menganalisis respons dan upaya pemerintah terhadap revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi lembaga-lembaga internasional, untuk dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional dengan mengacu pada kondisi ekonomi global.

Respon dan Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

Dalam menghadapi risiko ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi, perlu diantisipasi melalui simulasi dengan kebijakan yang disesuaikan perkembangan ekonomi saat ini. Pada tahapan keluar dari krisis (*escaping the crisis*), upaya perlu difokuskan pada pengeluaran di sektor kesehatan, dukungan fiskal yang sesuai target, kebijakan moneter akomodatif, dan memantau risiko terhadap stabilitas sektor keuangan. Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan ekonomi ke depan dalam menjaga momentum tersebut dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam lingkup makro-ekonomi.

Pemulihan ekonomi Indonesia sangat terkait dari prospek ekonomi global 2021 yang positif dan dapat dijadikan sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 sebagai syarat untuk pemulihan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah ialah menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui bauran kebijakan khususnya fiskal-moneter. Pemulihan perlu dilakukan agar tidak terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam dengan memanfaatkan momentum. Namun, dari sisi *policy* yang bisa dikontrol adalah melakukan penyesuaian kebijakan yang terukur.

Melalui penyesuaian kebijakan dan pemantauan implementasinya, maka pelemahan ekonomi nasional dapat ditahan pada tahun 2020 walau sempat terjadi resesi ekonomi. Namun, tercatat ekonomi nasional tumbuh -2,19% Triwulan IV-2020, yang membaik setelah terpuruk pada Triwulan II- 2020 di angka -5,32% (Media Indonesia, 10 April 2021).

Namun di sisi lain, saat ini ekspor manufaktur Indonesia tumbuh 9% secara tahunan pada Februari 2021. Hal ini bisa dijadikan momentum dalam meningkatkan penerimaan. Produk yang menjadi andalan adalah besi baja, logam dasar mulia, kimia dasar organik dari hasil pertanian Perbaikan kinerja sisi produksi perekonomian di atas akan dapat berkelanjutan jika disertai pemulihan sisi permintaan masyarakat. Berdasarkan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus membaik sejak turun signifikan ke 84,9 pada Januari 2021 karena peningkatan drastis kasus positif harian (Kompas, 13 April 2021).

Momentum perbaikan kinerja ekonomi sebenarnya saat ini belum stabil dan belum adanya kepastian ekonomi global masih tetap membayangi. Kondisi ini akibat progres dan distribusi vaksinasi yang tidak sama di setiap negara. Negara-negara maju (produsen) cenderung menahan distribusi vaksin dengan alasan kedaruratan nasional. Pada saat yang sama di beberapa negara Eropa, euforia vaksinasi berhadapan dengan merebaknya mutasi baru virus Covid-19 yang akan menghambat pergerakan.

Dalam tahun 2021 pemerintah sudah melakukan upaya dengan masif, walaupun dengan konsekuensi defisit fiskal yang semakin melebar dari yang ditetapkan oleh UU. Namun pemerintah harus tetap mengontrol defisit fiskal agar tetap terkendali. Terbatasnya anggaran dalam implementasi kebijakan fiskal dan moneter untuk terus memberi stimulus ekonomi menimbulkan kekhawatiran apakah investasi swasta dan konsumsi masyarakat bisa pulih dalam memastikan kesinambungan pemulihan ekonomi. Konsumsi

domestik yang menggerakkan 59% dari PDB di Indonesia, diperkirakan akan pulih dengan meluasnya pada saat momentum vaksinasi. Namun ada dua pertanyaan yang muncul, *pertama*, seberapa cepat program vaksinasi bisa dilaksanakan. *Kedua*, seberapa cepat tenaga kerja yang kena PHK bisa bekerja kembali. Tidak hanya konsumsi domestik membantu belanja pemerintah dalam pemulihan ekonomi, tetapi investasi baik swasta maupun BUMN harus ditingkatkan. Bukan saja levelnya, melainkan juga produktivitas atau efektivitasnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi (*Bisnis Indonesia*, 12 April 2021). Tentunya melalui perubahan yang terencana dengan baik terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 merupakan momentum yang pertama sejak krisis 1998, dalam mempercepat reformasi ekonomi.

Menjaga Keberlangsungan Pemulihan

Dalam upaya keberlangsungan pemulihan ekonomi, kebijakan peningkatan kesehatan tentunya harus dilakukan secara simultan. Pemerintah juga harus menghelat vaksinasi yang berkelanjutan sesuai prioritas yang merupakan *game changer*. Walaupun sampai saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 negara yang melakukan vaksinasi tercepat, namun bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Pemerintah dan masyarakat harus tetap melakukan reformasi struktural dengan mendorong mobilitas masyarakat dan konsumsi tetapi juga menjaga agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak menyebabkan kenaikan Covid-19.

Dari sisi anggaran pemerintah telah memberikan guyuran stimulus,

seperti bantuan sosial masyarakat dan insentif dunia usaha seperti perpajakan. Untuk UMKM korporasi pun, pemerintah menggelontorkan insentif sebesar Rp184,83 triliun. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan dengan uluran tangan dari Bank Indonesia (BI), OJK, maupun LPS, akan membawa perekonomian Indonesia di tahun ini untuk berada di kisaran 4,5% *yoy* hingga 5,3% *yoy* sesuai proyeksi awal (kontan.co.id, 9 April 2021). Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban pemberian tunjangan hari raya (THR) dan subsidi hari belanja *online* nasional (harbolnas), akan ada lonjakan permintaan selama April-Mei 2021 diharapkan akan dapat mendorong bergeraknya ekonomi, walaupun dibatasi karena kebijakan larangan mudik selama Lebaran dari pemerintah pusat.

Berbagai stimulus dan program perlindungan sosial yang dikurcurkan pemerintah tidak secara langsung diharapkan akan meningkatkan daya beli, karena penyebaran Covid-19 masih belum terkendali kendati proses vaksinasi telah dijalankan. Indeks harga konsumen selalu memiliki siklus yang sama setiap Ramadan dan Lebaran. Akan tetapi, tekanan pandemi menjadi penyumbang laju daya beli masyarakat sejak 2020 hingga menjelang Ramadan 2021. Namun demikian, Idul Fitri 2021 ini lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyebabnya adalah mulai berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional sudah terjadi sejak kuartal III/2020, dan mobilitas sedikit lebih baik karena ada program vaksin (Bisnis Indonesia, 10 April 2021).

Harapan pemulihan ekonomi Indonesia dari sisi kebijakan semakin menguat, seperti terlihat pada saat memasuki periode Ramadan dan

Idul Fitri 2021 yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dalam mengungkit ekonomi kuartal II-2021, kebijakan tersebut antara lain *Pertama*, pemerintah telah memperluas diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil yang memenuhi syarat. *Kedua*, stimulus kredit UMKM sebesar Rp400 miliar mulai 20 April - Juni 2021 untuk meningkatkan permodalan debitur UMKM. Kedua stimulus itu diharapkan bisa mendongkrak ekonomi dari sisi suplai maupun permintaan dimulai April-Juni 2021.

Dari beberapa indikator yang menunjukkan produksi dalam negeri menunjukkan sentimen positif. Pada Maret 2021 lalu, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan sebesar USD1,5 miliar. Ekspor mencapai USD18,35 miliar atau tumbuh 30,4% secara tahunan (*year on year/yoy*). Namun arah pemulihan ekonomi mulai tampak di tengah Covid-19. Sementara itu impor mencapai USD16,79 miliar atau tumbuh 25,7% *yoy*. Peningkatan tersebut menjadi tanda pulihnya permintaan dan produksi dalam negeri (Bisnis Indonesia, 19 April 2021).

Pemerintah juga telah memberikan program stimulus melalui hibah sektor pariwisata dan belanja pada Kementerian/Lembaga. Provinsi Bali misalnya, mendapatkan hibah sebesar Rp1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota atau sebesar 39,4% dari alokasi nasional. Sedangkan dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik mencapai Rp107,7 triliun. Di samping itu, pemerintah pun makin memperluas jangkauan pelaku usaha yang dapat menikmati fasilitas penjaminan investasi melalui pemberlakuan PMK No. 32/PMK.08/2021.

Dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan makin banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas ini dan usahanya pun dapat memiliki daya tahan untuk bersama-sama pulih seiring pulihnya ekonomi nasional (kumparan.com, 9 April 2021).

Namun, kebijakan untuk akselerasi perekonomian masih akan tersendat dan tidak maksimal karena adanya kebijakan yang lain menghambat pergerakan masyarakat. Salah satunya yang akan menahan kegiatan ekonomi dan turunannya adalah pelarangan mudik dan PPKM yang diperpanjang. Hal ini akan semakin memperpuruk sektor usaha transportasi dan kegiatan ekonomi lainnya terkait ritual mudik (Bisnis Indonesia, 12 April 2021). Laju perekonomian dari sisi konsumsi tentunya akan menurun seiring penerapan kebijakan larangan mudik dan PPKM. Indikatornya terlihat dari penjualan ritel yang masih tumbuh negatif 17,1% di Maret 2021. Hal ini mencerminkan aktivitas konsumsi yang masih belum maksimal dan belum sepenuhnya pulih seiring kasus Covid-19 yang masih bertambah. Diharapkan strategi yang sudah dimulai sejak tahun 2020 dan kini dengan adanya vaksin, kepercayaan baik masyarakat dan dunia usaha akan menjadi momentum dalam pemulihan.

Penutup

Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu direspon melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Penyesuaian (*adjustment*) kebijakan dan momentum pemulihan ekonomi global tahun 2021 seharusnya menjadi acuan dalam pemulihan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan yang maksimal. Keberlanjutan pemulihan ekonomi

2021 tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.

Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan ketat terhadap program pemerintah dalam menstimulasi konsumsi. Kebijakan dalam jangka panjang agar difokuskan untuk mendorong investasi. Mempercepat pemulihan dengan konsisten melaksanakan vaksinasi dan memperbaiki koordinasi kebijakan antar demi mempertahankan kepercayaan negara-negara investor di Indonesia. Kementerian Keuangan bersama BI dan OJK, serta dukungan dan pengawasan DPR RI terus berkolaborasi menyusun berbagai bauran kebijakan agar dunia usaha dapat terakselerasi proses pemulihannya secara maksimal.

Referensi

- "Akselerasi Kebijakan Tangkal Kontraksi Lebih Dalam", *Media Indonesia*, 10 April 2021, hal. 11.
- "Berkat Vaksin dan Dukungan Kebijakan, Pemulihan Ekonomi Membaik", 12 April 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berkat-vaksin-dan-dukungan-kebijakan-pemulihan-ekonomi-membaik/>, diakses, 19 April 2021.
- Ichsan, Fauzi. 2021. "Urgensi Reformasi Korporasi & Stimulus Ekonomi", *Bisnis Indonesia*, 12 April 2021, hal.1.
- "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021", Tahun 2021, hal.11.
- "Konsumsi Jelang Ramadan: Gerak

- Inflasi Diprediksi Terbatas”, *Bisnis Indonesia*, 10 April 2021, hal. 3.
- Kuncoro, Ari. 2021. “Memanfaatkan Lokomotif Dunia”, *Harian Kompas*, Selasa 13 April 2021, hal. 1 & 15.
- “Progres Pemulihan Ekonomi Laju Konsumsi Tertahan”, *Bisnis Indonesia*, 19 April 2021, hal.11.
- “Sri Mulyani Gelontorkan Dana Hibah Rp1,18 T untuk Pulihkan Pariwisata di Bali”, 9 April 2021, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-gelontorkan-dana-hibah-rp-1-18-t-untuk-pulihkan-pariwisata-di-bali>- diakses 20 April 2021.
- “Tinjau Ulang Larangan Mudik”, *Bisnis Indonesia*, 12 April 2021, hal. 20.



Mandala Harefa
mandala.harefa@dpr.go.id

Mandala Harefa, S.E., M.Si., menyelesaikan Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang desentralisasi dan ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam memberikan data-data hasil penelitian untuk menyusun kajian, analisa kebijakan, bagi Alat Kelengkapan Dewan, dan para Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku, yang topiknya berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan publik sesuai dengan fungsi kedewanan, antara lain mengenai keuangan negara dan daerah, ekonomi regional, dan topik kebijakan publik lainnya.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.